

SKRIPSI



**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN E-MUSRENBANG
DI KELURAHAN SUNGAI BAMBU KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA**

Disusun Oleh:

Nama : Dany Akbar Muzakky

NPM : 2031020105

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

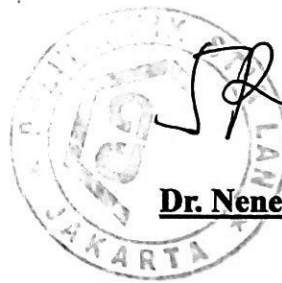
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun'. The signature is stylized and cursive, with a long horizontal stroke at the bottom.

Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

Diperiksa dan disahkan oleh panitia ujian kesarjanaan Ilmu Administrasi
Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta, pada tanggal 14
November 2023

Ketua merangkap Anggota,



Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si

Sekretaris merangkap anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Retnayu Prasetyani".

Retnayu Prasetyani, SAP., MAP.

Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun".

Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dany Akbar Muzakky
NPM : 2031020105
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiat terhadap karya tulis orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 25 Oktober 2023

Penulis,



Dany Akbar Muzakky

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan sang pencipta alam semesta dan seisinya yang berkat rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan e-Musrenbang Di Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara”.

Penulisan skripsi ini diajukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA-LAN Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat Ibu **Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.** selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan ketelitian, kecermatan, dan selalu memberi petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, maka ucapan terima kasih penulis haturkan juga kepada yang terhormat:

1. Ibu **Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA** selaku Direktur Politeknik STIA-LAN Jakarta, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak **Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan motivasinya kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak/Ibu dosen di Politeknik STIA-LAN Jakarta yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu tenaga pendidik Politeknik STIA-LAN Jakarta atas bantuan dan kerjasamanya yang telah diberikan kepada penulis.
5. Ayah dan Ibunda tercinta serta segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan material dan doa kepada penulis sejak

penulis lahir hingga sampai saat ini. Semoga keluarga tercinta diberikan perlindungan selalu oleh Allah SWT setiap harinya.

6. Lurah, staf, dan masyarakat Kelurahan Sungai Bambu serta seluruh *key informant* yang telah memberikan informasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Mas Bayu Bawana (Alumni STIA LAN Jakarta tahun 2017) yang telah membagi ilmunya dan memberikan pencerahan kepada penulis.
8. Diah, Agas, Gohan, Dara, Mini, Badriyah, Ayu, Bima, Rizki, Adi, Rafi, Kamal, Wahyu, Melky, Husni, dan Mamat selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan hiburan dan semangat dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
9. Rekan-rekan sesama mahasiswa khususnya konsentrasi APN yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan akibat keterbatasan pengalaman serta pengetahuan penulis. Penulis menghargai kritik dan juga saran yang bersifat konstruktif, sehingga skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama bagi Penulis.

Jakarta, 25 Oktober 2023

DAM.

ABSTRAK

Dany Akbar Muzakky, 2031020105

**Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan E-Musrenbang
Di Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Kota
Administrasi Jakarta Utara**

Skripsi, xv hlm, 108 halaman.

Kelurahan Sungai Bambu memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam menyalurkan aspirasinya melalui e-Musrenbang berdasarkan hasil data aspirasi masyarakat dalam usulan Musrenbang di tingkat Kecamatan Tanjung Priok. Rendahnya partisipasi tersebut dapat menghambat kesuksesan pelaksanaan e-Musrenbang dan mengurangi kualitas perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dan dinamika yang terjadi di dalamnya terkait dengan pelaksanaan e-Musrenbang di Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Adapun aspek penelitian dalam penelitian ini adalah: sosialisasi, monitoring usulan yang belum terakomodir pada tahun sebelumnya, dan penginputan usulan melalui sistem e-Musrenbang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Kelurahan Sungai Bambu telah berpartisipasi dengan cukup baik, hal ini terbukti dari ketiga aspek penelitian semuanya menunjukkan telah dilaksanakan tetapi memang kurang optimal dalam pelaksanaan e-Musrenbang di Kelurahan Sungai Bambu. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat tersebut, penulis menyarankan: sosialisasi agar dilaksanakan secara bergelombang menyesuaikan dengan waktu kosong masyarakat, intensifikasi pemanfaatan website e-Musrenbang untuk memantau usulan masyarakat yang belum terakomodir pada tahun sebelumnya, penyebaran informasi melalui *Whatsapp Group* RT/RW, dan memperkuat materi pelatihan teknis bagi pendamping rembuk RW dalam penginputan usulan masyarakat.

Kata kunci: partisipasi, masyarakat, e-Musrenbang, rembuk RW

ABSTRACT

Dany Akbar Muzakky, 2031020105
Community Participation In Implementing E-Musrenbang
In Sungai Bambu Urban Village Tanjung Priok District North
Jakarta Administrative City

Essay, xv pages, 108 pages.

Sungai Bambu Urban Village has a low level of community participation in channeling their aspirations through e-Musrenbang based on the results of data on community aspirations in the Musrenbang proposal at the Tanjung Priok District level. This low participation can hinder the success of implementing e-Musrenbang and reduce the quality of sustainable development planning. The aim of this research is to determine and analyze community participation and the dynamics that occur in it related to the implementation of e-Musrenbang in Sungai Bambu Urban Village, Tanjung Priok District, North Jakarta Administrative City.

In this research, the research method used is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques used are interviews and document review. The research aspects in this research are: socialization, monitoring proposals that have not been accommodated in the previous year, and inputting proposals through the e-Musrenbang system.

The research result shows that in general the people of Sungai Bambu urban village have participated quite well in implementing e-Musrenbang in Sungai Bambu Urban Village. This is proven by the three research aspects, all of which show that it has been implemented but is indeed less than optimal in the implementation of e-Musrenbang in Sungai Bambu Urban Village. To optimize community participation, the author suggests: socialization to be carried out in waves to suit the community's free time, intensification of use of the e-Musrenbang website Musrenbang is to monitor community proposals that have not been accommodated in the previous year, dissemination of information via Whatsapp neighbourhood group and strengthen technical training materials for neighbourhood deliberation assistants in inputting community proposals.

Key note: participation, community, e-Musrenbang, neighbourhood consultation

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR FOTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	15
1. Tinjauan Kebijakan.....	15
2. Tinjauan Teori.....	20
B. Konsep Kunci.....	33
C. Kerangka Berpikir.....	34
D. Pertanyaan Penelitian.....	35

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	36
	A. Metode Penelitian.....	36
	B. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	1. Wawancara	37
	2. Telaah Dokumen	40
	C. Prosedur Pengolahan Data	40
	1. Teknik Pengolahan Data	40
	2. Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	43
	A. Deskripsi Umum Kelurahan Sungai Bambu	43
	1. Kondisi Geografis	43
	2. Kondisi Demografis	44
	3. Struktur Organisasi.....	47
	4. Kepegawaian	49
	B. Deskripsi Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Eletronik Tingkat Kelurahan Sungai Bambu	50
	C. Penyajian Dan Analisis Data.....	62
	1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan e-Musrenbang Di Kelurahan Sungai Bambu Dari Aspek Sosialisasi e-Musrenbang.....	63
	2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan e-Musrenbang Di Kelurahan Sungai Bambu Dari Aspek Monitoring Usulan Masyarakat Yang Belum Diakomodir Tahun Sebelumnya	74
	3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan e-Musrenbang Di Kelurahan Sungai Bambu Dari Aspek Penginputan Usulan Melalui Sistem e-Musrenbang	87

BAB V	KESIMPULAN.....	100
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....		104

LAMPIRAN

1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
2. Pedoman Telaah Dokumen
3. Pedoman Wawancara
4. Hasil Telaah Dokumen
5. Hasil Wawancara
6. Surat Penelitian Penulisan Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA-LAN Jakarta dari Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jakarta.
7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.
8. Daftar Riwayat Hidup

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar <i>Key Informant</i> Penelitian	38
Tabel 4.1	Daftar Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Di Kelurahan Sungai Bambu Agustus 2023	45
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan RW Kelurahan Sungai Bambu Agustus 2023	46
Tabel 4.3	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Atau Ruang Kepangkatan Di Kelurahan Sungai Bambu Agustus 2023	49

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Indeks <i>E-Government</i> Indonesia 2022.....	5
Gambar 1.2	Grafik PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015	6
Gambar 1.3	Alur Pelaksanaan E-Musrenbang Tahun 2023	8
Gambar 1.4	Aspirasi Masyarakat Usulan Musrenbang Kota Di Kota Provinsi DKI Jakarta 2023	9
Gambar 1.5	Aspirasi Masyarakat Usulan Musrenbang Kecamatan Di Tingkat Kecamatan Kota Jakarta Utara 2023	10
Gambar 1.6	Aspirasi Masyarakat Usulan Musrenbang Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Tanjung Priok 2023	11
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Berpikir	34
Gambar 4.1	Peta Kelurahan Sungai Bambu	44
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Kelurahan Sungai Bambu Agustus 2023	48
Gambar 4.3	Alur Proses Musrenbang Kelurahan Dengan Sistem Manual.....	51
Gambar 4.4	Alur Proses Musrenbang Kelurahan Dengan Sistem Elektronik.....	52
Gambar 4.5	Aspirasi Masyarakat Usulan Musrenbang RW.010	72
Gambar 4.6	Arsip e-Musrenbang Pada Tahun – Tahun Sebelumnya	80
Gambar 4.7	Input Usulan Perencanaan Pembangunan Tiap RW Di Wilayah Kelurahan Sungai Bambu Dalam Sistem E-Musrenbang Tahun 2023	89

DAFTAR FOTO

Foto 4.1	Sosialisasi e-Musrenbang di Kecamatan Tanjung Priok	66
Foto 4.2	Reses Anggota DPRD di Kelurahan Sungai Bambu	76



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR SINGKATAN

ASMAS	: Aspirasi Masyarakat
Bappeda	: Badan Perencanaan Daerah
CRM	: Cepat Respon Masyarakat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E-Musrenbang	: Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan
JAKI	: Jakarta Kini
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Subbanpeko	: Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota
PeGI	: Pemingkat <i>e-Government Index</i>
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UKPD	: Unit Kerja Perangkat Daerah
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Pelaksanaan otonomi daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi dan kekhasan yang dimiliki. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah diharapkan memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mereka dituntut untuk selalu responsif terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan sekitarnya.

Namun, saat ini banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami penurunan kinerja akibat rendahnya kinerja pegawai dan kurangnya penerapan model tata kelola yang sehat dan dinamis dalam pemerintahan, yang dikenal sebagai *good governance*. *Good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “Faktor yang dapat meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Konsep *good governance* mendorong pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sektor publik dengan baik, termasuk pembangunan pelayanan publik kepada masyarakat.”

Good governance merupakan standar tata kelola yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan. Menurut Sedarmayanti (2014:5) menjelaskan bahwa “konsep ini berusaha untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip (profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat)”. Penerapan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu strategi yang dapat diambil untuk menerapkan *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Maryam (2016:2) mengatakan bahwa “pelayanan publik menjadi penggerak utama dalam upaya mewujudkan *good governance*, dan dianggap penting

oleh semua aktor yang terlibat dalam unsur *good governance*". Pejabat publik, masyarakat sipil, dan dunia usaha memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan yang diberikan.

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan. Listyianingsih (2014:92) menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuantujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Teknologi merupakan hal yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Peran teknologi sering diandalkan dalam mempermudah dan mempercepat berbagai aktivitas manusia. Salah satu aspek yang berdampak besar dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah internet. Sebagai media informasi yang sangat penting, Sumolang (2013:1) mengatakan bahwa "internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat masa kini. Melalui internet, masyarakat dapat terhubung dan berkomunikasi secara langsung dengan dua orang atau lebih". Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi.

Pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari adalah hasil dari kompleksitas dan keragaman aktivitas manusia di berbagai sektor. Bahkan instansi pemerintahan pun telah mengutamakan penggunaan teknologi informasi, terutama internet, sebagai upaya memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat, dengan menjunjung tinggi kualitas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, pemerintah juga mengedepankan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,

pemerintah berupaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat menjadi krusial dalam membangun kepercayaan dan memenuhi harapan serta tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik merupakan ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik yang profesional. Pelayanan publik yang berkualitas harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, serta mencakup berbagai bidang pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, pelayanan publik didasarkan pada prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjadi pedoman. Asas-asas tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan mengacu pada asas-asas tersebut, instansi pemerintahan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan terhadap perubahan menuju kemajuan dengan menerbitkan kebijakan yang terkait dengan TIK. Salah satu kebijakan penting adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) di Indonesia. Dalam inpres tersebut, dijelaskan bahwa “Aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi”.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* (*e-Government Development Framework*) melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Kebijakan ini selanjutnya menjadi panduan bagi semua kebijakan

teknis terkait penerapan *e-Government*. *E-Government* atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, adalah penggunaan TIK oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Melalui *e-Government*, berbagai urusan bisnis dan administrasi yang terkait dengan pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mudah. Penerapan *e-Government* dalam administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi internal, penyampaian pelayanan publik, dan proses pemerintahan yang lebih demokratis.

E-Government menggunakan TIK sebagai alat untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Hal ini melibatkan penyediaan akses informasi yang mudah bagi masyarakat serta fasilitas layanan yang dapat dijangkau dengan mudah. *E-Government* juga bertujuan untuk menjadikan pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

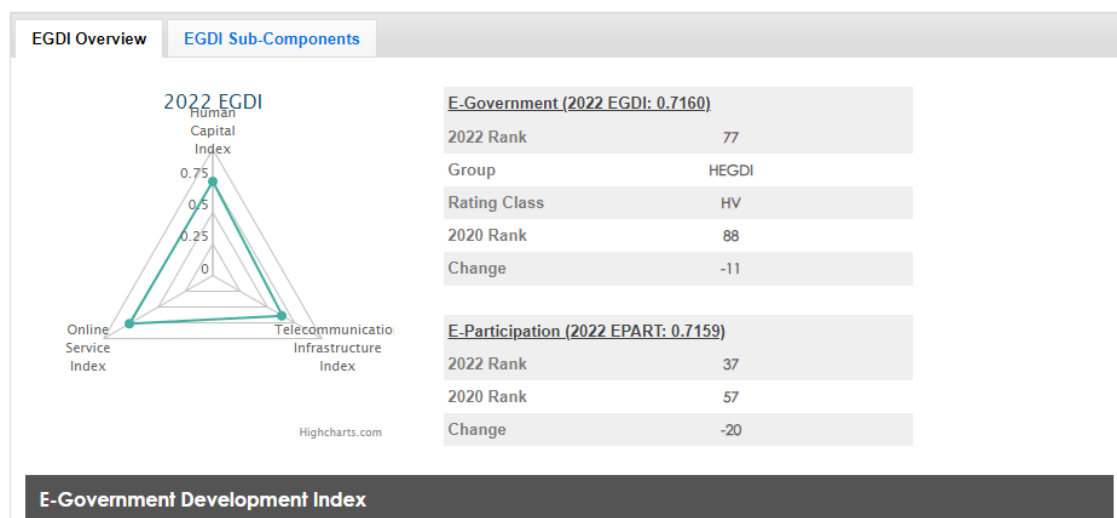
Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan bahwa “Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien”. Tujuan dari *e-Government* adalah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan mendorong pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan penerapan *e-Government* ini diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pemanfaatan TIK, pemerintahan dapat memperluas akses informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan kepada masyarakat.

Data survey terakhir yang dikeluarkan oleh indeks penggunaan *e-Government* di seluruh dunia oleh UN *e-Government Knowledge Database* yang berafiliasi dengan Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat ke 77 dari 193 negara pada tahun 2022. Padahal pada Tahun 2020 Indonesia menempati peringkat 88 dari 193 negara. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan penggunaan *e-Government* di Indonesia. Adapun data penggunaan *e-Government* pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

INDEKS E-GOVERNMENT INDONESIA 2022

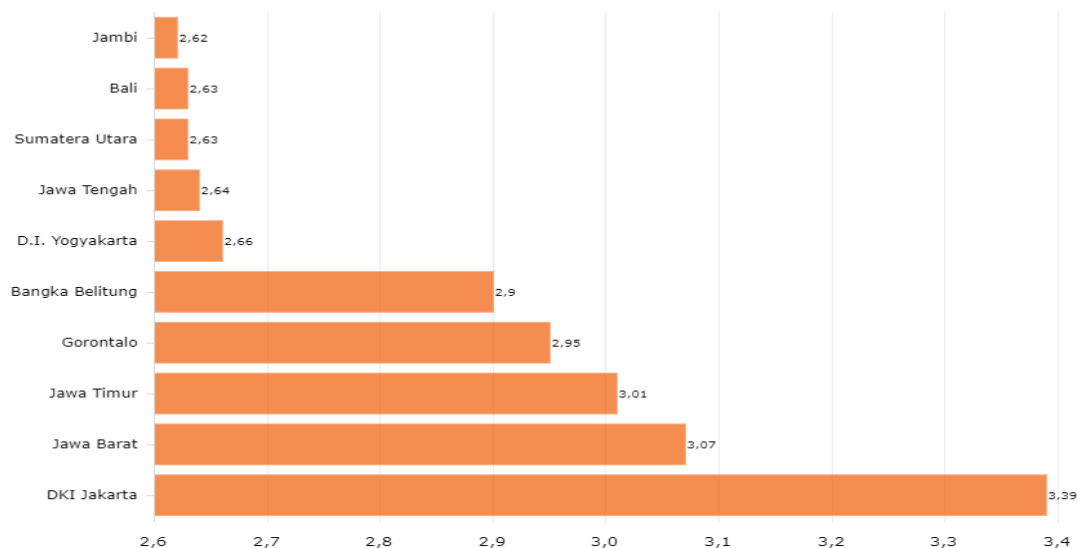


Sumber: e-Government Development Index (EDGI).

Sebelum data di atas disusun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) juga telah menyusun Pemingkatan *e-Government Index* (PeGI) di provinsi. Berikut ini adalah grafik PeGI tingkat provinsi tahun 2015 pada 10 provinsi dengan perolehan skor yang tertinggi:

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Gambar 1.2
GRAFIK PeGI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>.

Dari grafik di atas, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan nilai *e-Government* tertinggi pada tahun 2015 dan mampu mempertahankan posisinya dua tahun berturut-turut. Dengan nilai 3,39, Provinsi DKI Jakarta berhasil mengungguli provinsi lainnya. Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2013 menempati posisi puncak, di tahun 2015 berada di peringkat 2 dengan nilai 3,07. Selanjutnya posisi ketiga diisi oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai 3,07.

Dengan hasil ini, Provinsi DKI Jakarta dinilai sudah baik dalam menjalankan pemerintahan dan menentukan kebijakan berbasis TIK. Hal ini memudahkan para warga masyarakat, khususnya warga di Provinsi DKI Jakarta untuk mengakses segala informasi mengenai pemerintahan ataupun mendapatkan pelayanan dengan lebih cepat.

Salah satu bentuk implementasi dari *e-Government* yang telah diterapkan adalah melalui e-Musrenbang (Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah). Musrenbang Elektronik (e-Musrenbang) pertama kali diterapkan oleh Bappenas pada tahun 2014. E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang

dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Dengan dikembangkannya e-Musrenbang berbasis website ini diharapkan dapat mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sinergi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan serta mendorong penerapan prinsip-prinsip *good governance* (partisipatif, transparan, efektif dan efisiensi, serta akuntabel) dalam pemberian pelayanan publik. E-Musrenbang juga diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk kritik, saran, atau masukan.

Pentingnya e-Musrenbang muncul karena adanya fakta-fakta atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. Dalam hal ini, e-Musrenbang berperan sebagai sarana yang memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan musrenbang secara keseluruhan. e-Musrenbang tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi, tetapi juga mengubah cara tradisional perencanaan pembangunan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan e-Musrenbang di seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai alternatif dari komunikasi tradisional. Salah satu pelaksana dari e-Musrenbang ini adalah Pemerintah Kelurahan Sungai Bambu, yang berada di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pelaksanaan e-Musrenbang yang terakhir kali diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta adalah pada Tahun 2022 yang pelaksanaannya berdasarkan pada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 dan Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ini adalah gambar alur pelaksanaan e-Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang bersumber dari Pedoman Umum Pelaksanaan Rembuk RW 2023:

Gambar 1.3
ALUR PELAKSANAAN E-MUSRENBANG
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023



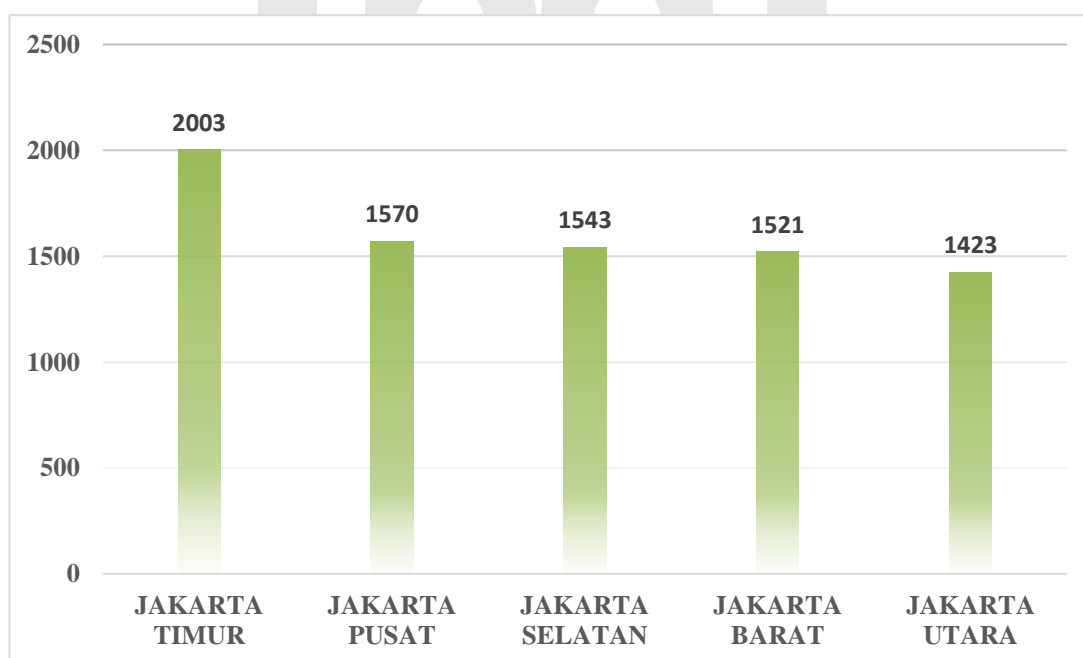
Sumber: Pedoman Umum Pelaksanaan Rembuk RW 2023.

Perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi e-Musrenbang melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi. Implementasi aplikasi e-Musrenbang yang telah dilakukan di Kelurahan Sungai Bambu pada tahun 2022 mencakup wilayah 104 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW). Pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan ini dipimpin oleh Lurah Sungai Bambu. Sedangkan pada tingkat terbawah, kegiatan Musyawarah Rukun Warga (Musrenbang RW) dilaksanakan oleh perangkat RW, RT, dan partisipasi warga yang tinggal di wilayah masing-masing.

Penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan dalam usulan Musrenbang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut memberikan usulan pembangunan yang akan dilakukan setiap tahunnya. Berdasarkan data Aspirasi Masyarakat Usulan Musrenbang Kota Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diakses

melalui website Musrenbang.jakarta.co.id, diketahui bahwa Kota Jakarta Utara memiliki jumlah usulan Musrenbang yang lebih rendah dibandingkan dengan kota administrasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 1.4 sebagai berikut:

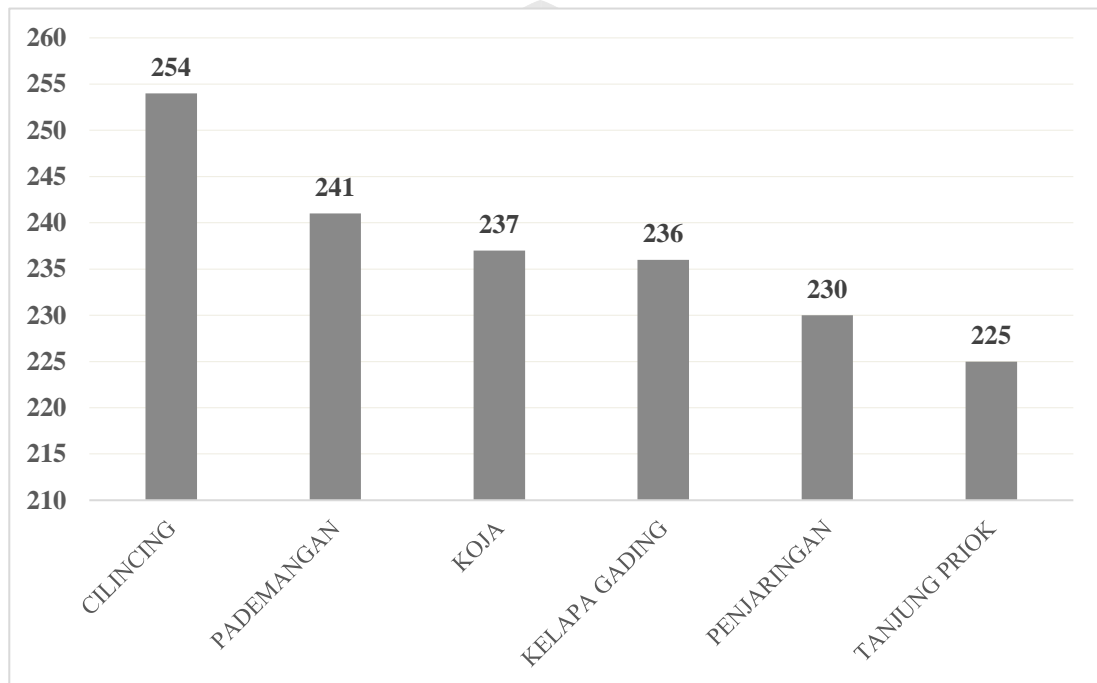
Gambar 1.4
ASPIRASI MASYARAKAT USULAN MUSRENBANG KOTA
DI TINGKAT KOTA PROVINSI DKI JAKARTA 2023



Sumber: musrenbang.jakarta.co.id

Dari hasil data di atas, diketahui bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki hasil usulan Musrenbang tertinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki jumlah usulan yang paling rendah di antara kota administrasi lainnya dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Kota Administrasi Jakarta Utara diketahui memiliki 6 kecamatan yang memiliki perbedaan tingkat aspirasi masyarakat dalam menyampaikan usulan melalui Musrenbang. Data aspirasi masyarakat usulan Musrenbang kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

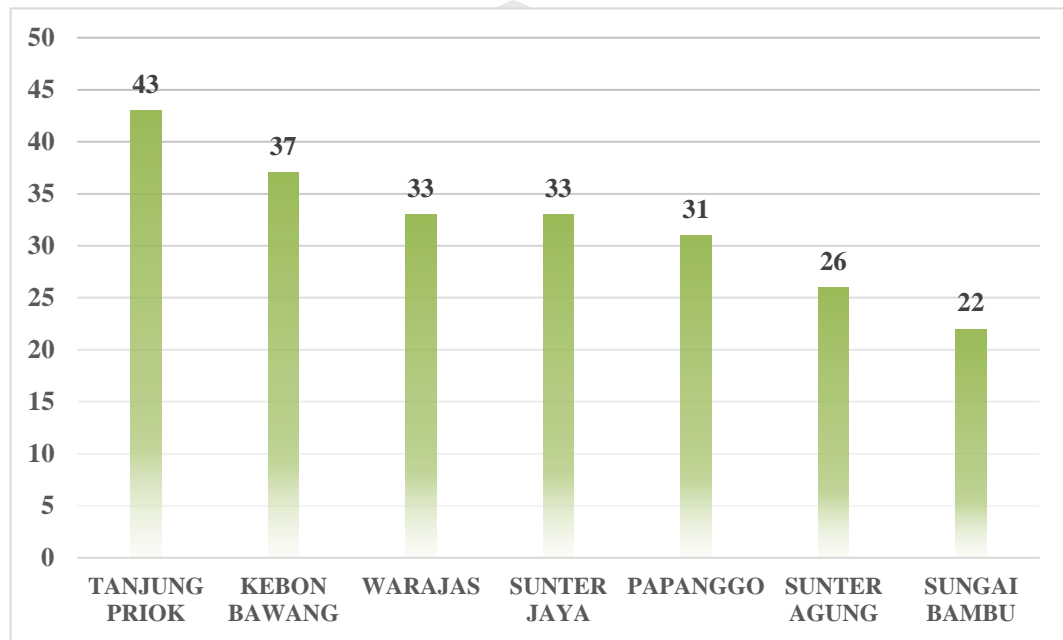
Gambar 1.5
ASPIRASI MASYARAKAT USULAN MUSRENBANG KECAMATAN DI
TINGKAT KECAMATAN KOTA JAKARTA UTARA 2023



Sumber: musrenbang.jakarta.co.id

Tanjung Priok menjadi kecamatan yang memiliki jumlah usulan Musrenbang yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini berdampak dalam pembangunan yang terjadi pada tingkat bawah yaitu kelurahan. Kecamatan Tanjung priok memiliki 7 kelurahan yang memiliki tingkat usulan Musrenbang berbeda-beda. Berikut adalah data aspirasi masyarakat usulan Musrenbang tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Tanjung Priok.

Gambar 1.6
ASPIRASI MASYARAKAT USULAN MUSRENBANG KELURAHAN DI
TINGKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK 2023



Sumber: musrenbang.jakarta.co.id

Berdasarkan data tersebut di atas, Kelurahan Sungai Bambu memiliki 22 usulan dalam Musrenbang sehingga Kelurahan Sungai Bambu memiliki jumlah usulan yang lebih rendah dibandingkan kelurahan lainnya. Kejadian ini bisa terjadi karena masyarakat di Kelurahan Sungai Bambu memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam menyalurkan aspirasinya melalui e-Musrenbang. Usulan Musrenbang memang menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan Sanjaya (2013:126) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Mambora Kecamatan Palu Utara” menjelaskan hasil observasi awal peneliti menunjukkan fakta di lapangan bahwa partisipasi warga di Kelurahan Mamboro sangat rendah dalam musrenbang. Faktor kurangnya sosialisasi dan keacuhan dari warga adalah dua hal utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Menurut Ridwan (2013:9) “Dalam melaksanakan perencanaan

pembangunan pada tingkat kelurahan, partisipasi masyarakat adalah unsur yang paling penting bagi keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan secara keseluruhan". Hal ini akan lebih cepat tercapai dengan menerapkan perencanaan yang berbasis *bottom up planning*. Dengan maksud, masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh aspek pembangunan, sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan dan pemanfaatannya.

Rendahnya partisipasi tersebut dapat menghambat kesuksesan pelaksanaan e-Musrenbang dan mengurangi kualitas perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-Musrenbang di Kelurahan Sungai Bambu penulis dapatkan pada saat melakukan *preliminary* dan mendapatkan informasi dari pihak kelurahan. Adapun informasi yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas dan infrastruktur teknologi: terjadi karena terbatasnya akses internet, kurangnya perangkat komputer atau telpon seluler cerdas (*Smartphone*), serta minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi.
2. Tingkat literasi digital: terjadi karena mayoritas masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang TIK dan internet. Mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan platform e-Musrenbang dan memahami proses partisipasi secara elektronik.
3. Kesadaran dan minat partisipasi: terjadi karena masyarakat tidak merasa terlibat secara langsung dalam pembangunan wilayah mereka dan kurangnya pemahaman tentang manfaat dari partisipasi aktif. Sehingga menyebabkan mereka tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam e-Musrenbang.
4. Komunikasi dan sosialisasi: terjadi karena informasi tentang e-Musrenbang tidak disampaikan dengan baik. Sehingga menyebabkan masyarakat kurang menyadari pentingnya kegiatan tersebut dan kurang memahami bagaimana mereka dapat berpartisipasi.

Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai dinamika yang terjadi terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-Musrenbang di Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan dapat diidentifikasi solusi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-Musrenbang di Kelurahan Sungai Bambu, Kota Administrasi Jakarta Utara?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dan dinamika yang terjadi di dalamnya terkait dengan pelaksanaan e-Musrenbang di Kelurahan Sungai Bambu, Kota Administrasi Jakarta Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Terhadap Dunia Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru dalam literatur akademis terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya dengan memanfaatkan TIK seperti e-Musrenbang.

b. Manfaat Terhadap Dunia Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara dalam merencanakan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-Musrenbang ke depannya.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**